IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) DI INDONESIA

Oleh: Anita Putri Rukayah Siregar

anitaprsg@gmail.com

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi M. Si

Bibliografi: 39 Jurnal, 23 Buku, 12 Artikel dan 14 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Violence against women is already being world issue, where women's rights are not fulfilled and discrimination against women happened on some aspects of life. To reduce the number of violence against women and eliminate any forms of discrimination against women, UN created a convention called Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Indonesia ratified this convention in 1984, but in the following years after ratification, the number of violence against women keeps increasing especially on domestic violence case. In 1998, Indonesia's President BJ Habibie founded National Commission of Women (Komnas Perempuan) as National Human Rights Institute (NHRI) in Indonesia that works as the national correctional system, and monitoring enforcement of women's right, with CEDAW as its work foundation. The sources of this research were obtained through literature reviews, journals, books, articles, websites, and others. This research used qualitative methods and generating descriptive data. In terms to solve the problem, this research is using the Socialist Feminism perspective with assume that socialist feminism is the most appropriate perspective to describe women's issue especially in domestic violence case where patriarchy and capitalism are the main problem that caused domestic violence against. This research is using Constructivism theory where CEDAW is the main convention that constructed in Indonesia and Komnas Perempuan) that implementing CEDAW in Indonesia as the level of analysis. Human's Rights is used as the concept where feminism is created by those issues. This research shows that implementation forms of CEDAW by Komnas Perempuan to raise and increase women's awareness, especially in domestic violence that being the main issue, are; formulating laws on the elimination of domestic violence, releasing annual report of violence against, supporting Indonesia's women movements and releasing journals and books about domestic violence.

Key Words: CEDAW, Discrimination, Domestic Violence, Women's Rights, Komnas Perempuan.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disingkat sebagai HAM) adalah salah satu gejala global yang menjadi perhatian hubungan internasional sejak berakhirnya perang dingin pada akhir dekade 1980-an.¹ HAM begitu penting bagi setiap individu sehingga masyarakat internasional membuat beberapa instrumen hukum yang berhubungan dengan hak dasar sebagai manusia. Di dalam berbagai instrumen hukum tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

HAM lahir sebagai sebuah konsep yang menjadi isu penting karena munculnya kesadaran manusia akan pentingnya mengakui, menghormati dan mewujudkan eksistensi kemanusiaan manusia secara utuh. Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia tidak lepas dari perbincangan mengenai hak asasi setiap individu, salah satunya perempuan. Hak Asasi Perempuan dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.² Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Pengakuan hak perempuan di tingkat internasional sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disingkat sebagai DUHAM) tahun 1947. Kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia diatur dalam DUHAM, dan di dalamnya termasuk hak perempuan. DUHAM secara tegas sudah menuliskan hak atas persamaan terhadap perempuan, namun pada tahun

1963 Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuk dengan korban perempuan beragam usia dan dari berbagai lapisan sosial masih terus berlanjut, dan meminta agar dapat dibuat suatu rancangan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.³ Sehingga, pada tahun 1979 dibentuklah sebuah instrument standar internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan oleh PBB, yaitu *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya disingkat sebagai CEDAW). Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang berisi pengakuan secara universal dan hukum serta standar-standar tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan.⁴

CEDAW adalah salah satu konvensi utama tingkat internasional yang membela hak-hak perempuan sebagaimana tercantum dalam resolusi Mahkamah Umum No. 34/180 tanggal 18 Desember 1979. Disetujuinya CEDAW merupakan puncak dari upaya Internasional yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia.⁵ CEDAW memuat 30 pasal untuk diadopsi dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB, dan secara legal

³ Achie Sudiarta Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2000).

⁴ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005).

⁵ *Assessing the Status of Women, A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, Update by the Division for the Advancement of Women Department of Economic and Social Affairs, United Nations 2000. Diakses di <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>. Diakses pada 14 September 2018.

¹ Haris Azhar, *Tantangan Kebijakan Luar Negri Indonesia dalam Mempromosikan Hak Asasi Manusia* (Jakarta Pusat: Kontras, 2014), 2.

² Nuraida Jamil, *Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW*.

dinyatakan sebagai dokumen internasional (*entry into force*) tanggal 3 September 1981.

CEDAW menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

- a. Kesetaraan substantif;
- b. Non-diskriminasi; dan
- c. Kewajiban Negara.

Indonesia meratifikasi *CEDAW* pada tahun 1984 dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hal tersebut mengikat Indonesia untuk melaksanakan perlakuan untuk tidak membedakan hak-hak perempuan dan laki-laki di segala bidang kehidupan. Setelah *CEDAW* diratifikasi oleh Indonesia, maka Indonesia berkewajiban untuk melaporkan secara periodik pelaksanaan *CEDAW* yang berupa *National Report* ke Komisi Status Wanita.⁶

Aktivis perempuan di masa sebelum kemerdekaan, telah mencatat kasus-kasus perkawinan paksa, poligami, perceraian secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadilan bagi istri dan anak, dan bentuk-bentuk kesewenangan lain terhadap perempuan. Di masa Orde Lama, juga tercatat masalah-masalah perempuan dalam

perkawinan, sebagai buruh di tempat kerja, dan eksploitasi perempuan sebagai objek seksual. Pada saat Orde Baru, mereka mencatat aktifnya beberapa lembaga swadaya masyarakat memberikan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan.⁷ Meski demikian, selama bertahun-tahun fakta kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian kelompok-kelompok kecil. Artinya, belum menjadi perhatian publik.

Masyarakat baru menyadari keseriusan masalah kekerasan terhadap perempuan, setelah berlangsung kerusuhan Mei 1998, dimana Indonesia dikejutkan dengan kasus kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, dan beberapa daerah lain, yang juga mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan seksual massal terhadap perempuan, khususnya etnis Tionghoa.⁸

Dengan dilatarbelakangi oleh peristiwa tersebut, isu kekerasan terhadap perempuan mulai menjadi perhatian publik, yang disusul dengan; (1. dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada bulan Oktober 1998; dan (2. bertambahnya jumlah perempuan, khususnya dari daerah-daerah operasi militer (Aceh, Timor Timur/Timor Loro Sae, dan Irian Jaya/Papua), yang bersaksi mengenai kekerasan terhadap perempuan, yang dilakukan aparat. Bersamaan dengan itu, mulai disadari keseriusan masalah dari berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, yang selama ini banyak terjadi dalam masyarakat, tetapi kurang

⁶ Khusus untuk *CEDAW*, laporan dilaksanakan ke Division for the Advancement of Women in New York, lihat *United Nation High Commissioner for Human Rights-Introduction to the conventional mechanisms (treaty monitoring bodies)* yang dikeluarkan oleh the Swedish International Development Co-operation Agency (Sida) tahun 2001. Diakses di https://www.ohchr.org/Documents/Publication_s/HRhandbooken.pdf. Diakses pada 14 September 2018.

⁷ Kristi Poerwandari, dkk., *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* dalam Publikasi Komnas Perempuan (Ameepro: Jakarta, 2002), 22.

⁸ *Tragedi 1998 dalam Perjalanan Bangsa Disangkal!* dalam Publikasi Komnas Perempuan (Jakarta, 2013), 10.

memperoleh perhatian, terutama kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Data dan analisis kekerasan terhadap perempuan menunjukkan situasi darurat kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam ranah Rumah Tangga. Peningkatan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga kepada Komnas Perempuan dapat menjadi suatu bukti bahwasanya kesadaran perempuan terutama istri dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga, yang sebelumnya dianggap sebagai isu privat, juga mengalami peningkatan. Hal tersebut mendorong penegakan Hak Asasi Perempuan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM dalam rangka mengimplementasikan *CEDAW* di Indonesia.

Penelitian ini diangkat untuk mengetahui implementasi *CEDAW* di Indonesia dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga yang menerapkan Konvensi ini di Indonesia. Peneliti membatasi penelitian pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan tahun 2001-2010.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Feminisme Sosialis

Feminis sosialis mulai dikenal sejak tahun 1970-an sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Secara garis besar konsep-konsep dasar pemikiran feminis sosialis yaitu berdasarkan konsep patriarki, kelas, gender, dan reproduksi. Bagi feminis sosialis, kapitalisme dan patriarki merupakan ideologi yang menyebabkan terjadinya penindasan terhadap kaum wanita. Feminisme sosialis mengadopsi teori praksis Marxisme, yaitu teori

penyadaran pada kelompok tertindas agar perempuan sadar bahwa mereka merupakan kelas yang dirugikan. Proses penyadarannya adalah dengan cara membangkitkan emosi para perempuan agar mereka mengubah keadaannya.¹⁰ Proses penyadaran ini menjadi inti feminisme sosialis. Menurut mereka, banyak para perempuan yang tidak sadar bahwa mereka adalah kelompok yang tertindas.

Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan feminisme Marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Asumsi yang digunakan oleh feminisme sosialis adalah bahwa dalam masyarakat, kapitalis bukan satu-satunya penyebab utama keterbelakangan wanita sebagai wanita. Mereka mengatakan faktor gender, kelas, ras, individu atau kelompok dapat juga berkontribusi bagi keterbelakangan wanita.¹¹ Sehingga perempuan kerap menjadi korban diskriminasi bahkan dalam ranah personal, yaitu rumah tangga.

b. Tingkat Analisa: Kelompok

Penelitian ini menggunakan tingkat analisis kelompok. Yang mana asumsi dari level analisis ini bahwasannya hubungan internasional sebetulnya adalah hubungan antar berbagai kelompok kecil diberbagai

⁹ Kristi Poerwandari, *loc. cit.*

¹⁰ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender.* (Bandung: Mizan Pustaka, 1999), 133.

¹¹ Rosemary Putnam Tong, *op. cit.*, 21.

negara. Artinya, peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu, tetapi oleh kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat keamanan, politbiro dan sebagainya) dan oleh organisasi, birokrasi, departmen, badan-badan pemerintahan dan sebagainya. Dengan demikian untuk memahami hubungan internasional kita harus mempelajari perilaku kelompok-kelompok kecil dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional.

c. Teori Konstruktivisme

"Identities are the basic of interest." Kalimat singkat yang diungkapkan oleh Alexander Wendt ini dapat menjelaskan konstruktivisme secara mendalam. Setidaknya terdapat dua gagasan kunci Konstruktivisme yang relevan bagi studi HI: pertama, keyakinan bahwa struktur-struktur yang menyatukan umat manusia lebih ditentukan oleh shared ideas (gagasan-gagasan yang diyakini bersama) dari pada kekuatan material. Keyakinan tersebut merepresentasikan perspektif idealis yang pernah mendominasi disiplin HI terutama sebelum perang dunia ke II; dan kedua, kepercayaan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor lebih ditentukan oleh shared ideas dari pada faktor-faktor alam. Artinya tindakan setiap aktor tidak semata-mata ditentukan oleh motif, alasan dan kepentingan mereka akan tetapi lebih dibentuk oleh interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya (struktur sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya).

Secara sederhana, konstruktivis menaruh perhatian pada kesadaran manusia dan tempat yang diambilnya dalam sistem internasional yang mana disusun oleh ide-ide, bukan sekedar material. Meski konstruktivisme

menekankan pada kepentingan yang ada dalam ideologi maupun kepercayaan aktor (yang dalam hal ini dicontohkan negara), konstruktivisme juga melihat aktor non-negara seperti aktor transnasional atau Non-Government Organizations (NGOs), institusi maupun birokrasi internasional.

d. Konsep Hak Asasi Manusia

Lahirnya konsep HAM sebagai sebuah isu penting karena munculnya kesadaran manusia akan pentingnya mengakui, menghormati dan mewujudkan eksistensi kemanusiaan manusia secara utuh. Karena itu semua umat bangsa dan negara di muka bumi ini harusnya berkomitmen untuk mengimplementasikannya untuk dapat mencapai hal tersebut diatas. Namun dalam praktiknya isu ras, kelas, gender dan lain-lain telah memporandakan hakikat HAM itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memandang bahwa kedudukan perempuan itu rendah. Isu HAM semakin terangkat kepermukaan karena dinilai hak-hak asasi manusia yang telah disepakati tanpa pembedaan gender ternyata belum dinikmati oleh banyak perempuan dan dinilai hak-hak asasi perempuan masih belum terlindungi. Sejak dulu hingga sekarang diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi, seperti penganiayaan, pemerkosaan, penjualan perempuan, perlakuan tidak adil dan sebagainya.¹² Melihat banyak sekali kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan maka dalam konferensi HAM di Wina pada tahun 1993 secara tegas dideklarasikan bahwa hak asasi

¹² Maman Arahman, dkk, *Modul Pelatihan Promosi CEDAW: untuk Tokoh Agama Melalui Interpretasi Ajaran Agama (Islam) yang Setara dan Adil Gender* (Jakarta Selatan: Solidaritas Perempuan, 2016).

perempuan bagian dari Hak Asasi Manusia.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum *Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations against Women (CEDAW)*

Agenda utama PBB sejak berdiri pada tahun 1945 adalah penegakan HAM, sebagaimana Piagam PBB tahun 1945 menetapkan tiga tujuan utama yaitu:¹⁴

- a) Mendorong terwujudnya perdamaian dan keamanan internasional
- b) Memajukan serta merumuskan pertumbuhan sosial ekonomi
- c) Melindungi hak-hak dan kebebasan setiap individu apapun ras, jenis kelamin, bahasa, atau agamanya.

Pada tahun 1946, PBB membentuk sub-komisi dari Komisi Hak Asasi Manusia, yaitu Komisi mengenai Kedudukan Perempuan atau *Commission on the Status of Women (CSW)*, yang bertugas untuk membuat rekomendasi dan laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB seputar promosi Hak Asasi Perempuan di Bidang Politik, Ekonomi, Sosial, dan Pendidikan, serta membuat rekomendasi mengenai masalah-masalah mendesak yang menuntut perhatian segera di bidang hak-hak perempuan.¹⁵

¹³ Arimbi Heroepoetri, dkk, *Pedoman Pemantauan Terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia* (Komnas Perempuan: 2011).

¹⁴ *The Three Pillars of The United States*. Diakses di <http://www.un.org/un70/en/content/videos/three-pillars/index.html> diakses pada 8 Februari 2019.

¹⁵ *A brief history of the Commission on the Status of Women*. Diakses di

Pada tahun 1967 PBB mengeluarkan *Declaration on The Elimination of Discrimination Against Women* atau Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan. Deklarasi tersebut memuat pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaannya. Namun, deklarasi ini belum memberikan pengertian menegai diskriminasi. Sehingga, enam tahun kemudian, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB membentuk tim khusus untuk menyusun rancangan sebuah konvensi.¹⁶ Sejalan dengan Konferensi Perempuan Sedunia, pada pertemuan yang kedua di Copenhagen dengan menghasilkan *World Plan of Action* yang menghimbau mengenai persiapan dan pengadopsian *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)* dengan prosedur-prosedur efektif untuk implementasinya.

CEDAW terdiri dari Mukadimah dan 30 pasal. Mukadimah memuat dasar pikiran tentang penghapusan diskriminasi, Pasal 1 mendefinisikan istilah diskriminasi dan Pasal 2-4 berisi kewajiban umum yang diemban Negara Pihak. Pasal 5-16 merupakan ketentuan substantif, menjelaskan berbagai bidang yang secara khusus berpengaruh terhadap perempuan serta kewajiban negara yang berkaitan dengan bidang tersebut. Tindak diskriminasi yang disebutkan dalam pasal tersebut pada umumnya terjadi pada bidang

<http://www.unwomen.org/en/csw/brief-history> diakses pada 8 Februari 2019

¹⁶ *Declaration on The Elimination of Discrimination Against Women* dalam publikasi UN General Assembly. Diakses di <https://www.refworld.org/docid/3b00f05938.html>, diakses pada 12 Februari 2019.

pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Selanjutnya, pasal 17-30 menjelaskan secara rinci dasar dan fungsi Komite CEDAW, proses pengkajian dan prosedur pelaporan kepada Komite dan komunikasi dengan badan-badan PBB lainnya.¹⁷ Untuk memantau kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Konvensi tersebut, maka dibentuklah *Committee on the Elimination of Discrimination Against Woman*, yang selanjutnya disebut Komite CEDAW. CEDAW akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan dan isu-isu baru yang menjadi perhatian Komite CEDAW, melalui Rekomendasi Umum (*General Recommendation*) dan Komentar Akhir (*Concluding Comments*).

Beberapa dasar pertimbangan perlunya sebuah peraturan tersendiri tentang Hak Asasi Perempuan, adalah:¹⁸

- a. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* serta kedua konvensi turunannya yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* belum cukup efektif dalam mengakomodir hak dasar perempuan.
- b. *UDHR* dan kedua konvensi turunannya, belum mengakui adanya perbedaan perempuan dengan laki-laki. Perbedaan tersebut mencakup perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan perempuan memerlukan perlakuan khusus (misalnya kebijakan cuti haid

bagi buruh perempuan).¹⁹ Hal ini mengakibatkan kebijakan terhadap perempuan cenderung bersifat proteksionis dan mengutamakan konsep *sameness* (perlakuan yang sama kepada perempuan dan laki-laki dengan standar laki-laki).²⁰

- c. *UDHR* dan kedua konvensi turunannya, tidak mengatur aksi afirmatif (*affirmative action*) kepada kelompok rentan dan dalam posisi lebih lemah, salah satunya adalah perempuan.

Prinsip-prinsip CEDAW

CEDAW menetapkan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi serta tindakan yang merugikan kedudukan perempuan dalam hukum, keluarga dan masyarakat. Bagian I dari konvensi memuat tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi, dan penekanan tentang kewajiban negara terhadap pelaksanaan Konvensi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengkaji apakah suatu kebijakan, aturan atau ketentuan mempunyai dampak jangka pendek atau jangka panjang yang merugikan perempuan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya:

- a. **Kesetaraan substantif**, menyadari bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi budaya yang diskriminatif sejak lama dan berdampak pada tidak dihargainya peran reproduksi

¹⁷ Achie Sudiarti Luluhima, *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, (New Delhi: Partners for Law in Development, 2004), hlm 18.

¹⁸ *Women's Rights are Human Rights* dalam UN Publication (New York and Geneva, 2014).

¹⁹ R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Pergulatan Feminisme dan HAM* (Bandung: Institut Perempuan, 2007), 11.

²⁰ Arskal Salim, dkk., *Memotret Kesadaran Gender Penegak Hukum di Aceh Utara* dalam *Serambi Mekah yang Berubah* (Pustaka Alvabet: Tangerang, 2010), 192.

perempuan. Peletakan prinsip kesetaraan untuk setiap pasal dinyatakan dalam mukadimah, pasal 2, 3, 4, dan 5.

- b. Non-diskriminasi**, menekankan bahwa aksi atau penghilangan yang bersifat diskriminatif jika hal itu memiliki “pengaruh atau tujuan” mendiskriminasi perempuan.²¹ Oleh karenanya, peraturan yang dianggap netral dan tujuannya tidak mendiskriminasi perempuan, namun dalam pelaksanaannya mendiskriminasi perempuan, juga harus dihapuskan. Peletakan prinsip non-diskriminasi terdapat pada pasal 1 dan 4.
- c. Kewajiban Negara**, menekankan bahwa penanggung jawab tugas adalah Negara. Hal ini berarti bahwa meskipun tanggung jawab untuk memastikan kesetaraan dan menghapus diskriminasi harus dilakukan oleh negara dan pelaku non-negara, hanya Negara yang secara langsung bertanggung jawab untuk melaksanakan *CEDAW*. Ada sekitar 37 kewajiban negara yang dicantumkan di dalam *CEDAW* agar hak-hak perempuan dapat dinikmati oleh kaum perempuan meliputi kewajiban didalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pelaksanaan *CEDAW* di Indonesia

Indonesia meratifikasi *CEDAW* menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984 disertai dengan reservasi ketentuan Pasal 29 ayat (1) mengenai penyelesaian perselisihan antara dua atau lebih negara mengenai penafsiran

²¹ *Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW, op. cit.*, 9.

dan penerapan *CEDAW* yang tidak dapat diselesaikan melalui perundang-undangan.

Berbagai peraturan perundang-undangan sejak ratifikasi konvensi tersebut telah diterbitkan, baik pengaturannya dalam UUD 1945 maupun perundangan lain yang terkait dengan ketentuan-ketentuan pengaturan dari tiap-tiap pasal *CEDAW* tersebut melalui reformasi hukum, yakni, pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki apa yang dipandang tidak sesuai atau salah dari sistem hukum tersebut agar menjadi benar dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²² Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah Keppres 181/1998 tentang Pembentukan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang kemudian ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005.

Inisiasi Pembentukan Komnas Perempuan di Indonesia

Lahirnya Komnas Perempuan sebagai salah satu bentuk dari implementasi *CEDAW*, tidak terlepas dari rangkaian sejarah gerakan perempuan Indonesia. Terdapat empat pembabakan gerakan perempuan Indonesia, yakni:

- 1) Masa kolonial Belanda dan Jepang**, lebih fokus pada pendidikan perempuan dengan mendirikan lebih banyak lembaga pendidikan di berbagai daerah dan pengorganisasian perempuan

²² A. A. Oka Mahendra, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006), 74.

bercorak moderen, namun pada masa penjajahan Jepang semua itu dibubarkan.

- 2) **Masa Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin**, konsentrasi terbesar gerakan perempuan adalah pada hak pilih perempuan untuk legislatif dan keterwakilan perempuan di parlemen.
- 3) **Masa pemerintahan Orde Baru**, keanggotaan organisasi-organisasi perempuan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi gerakan perempuan dan individu yang ahli dalam bidangnya.
- 4) **Gerakan perempuan di Era Reformasi**, pembentukan Komnas Perempuan.

Kekerasan terhadap Perempuan: Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap Perempuan disebut juga sebagai Kekerasan berbasis Gender (*gender based violence*) seperti tercantum dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Deklarasi Umum Majelis PBB no. 48/104 tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, merujuk pada:

*“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.”*²³

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abuse*) oleh suami

terhadap isteri atau sebaliknya, baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) maupun emosional/psikologis (rasa cemas, depresi dan perasaan rendah diri). Dalam rumusan lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri, atau bersama-sama, terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang tersubordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.²⁴ Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa KDRT tidak hanya terjadi antara suami dengan isterinya saja, tetapi juga terjadi antara orang tua dengan anak atau antara majikan dengan pembantunya dan pihak-pihak yang tersubordinasi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga.

Pengaruh CEDAW terhadap Hukum Nasional Indonesia Terkait Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

CEDAW tidak memberikan definisi yang jelas mengenai KDRT, namun PBB memberikan definisi KDRT dalam bingkai jender sebagai kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan perempuan sebagai target utama dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negatif pada perempuan dalam lingkup rumah tangga. Yang mana dari definisi tersebut kemudian diadopsi dalam Rekomendasi Umum no. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, sehingga Indonesia

²³ Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Resolusi Majelis Umum PBB 48/104, 20 Desember 1993.

²⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Fajar Pustaka, 2006), 2.

mengatur definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagai:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²⁵

Pengertian “kekerasan dalam rumah tangga”, yang dalam perumusan UU P-KDRT mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam CEDAW beserta rekomendasinya (Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan) yang berbunyi:

“Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki”.

Selanjutnya, Butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa:

“Konvensi dalam Pasal 1, menetapkan definisi tentang diskriminasi terhadap perempuan. Definisi diskriminasi itu termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan kepada seorang perempuan, karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Hal tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu,

paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Kekerasan berbasis gender bisa melanggar ketentuan tertentu dari Konvensi, walaupun ketentuan itu tidak secara spesifik tentang kekerasan”.

Korelasi lain bahwa KDRT merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Alinea keempat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang menegaskan:

“...Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.”

Pernyataan atas pandangan negara tersebut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1).

Ketentuan mengenai definisi “diskriminasi” dalam Pasal 1 CEDAW/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan pada Butir ke-6 Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 serta Pasal 1 mengenai pengertian KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dengan jelas menunjukkan hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan dalam menjabarkan bentuk kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender adalah tindakan diskriminasi. Hal yang lebih memperkuat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk diskriminasi adalah sebagaimana dilandaskan pada ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender juga telah dijamin perlindungannya dalam Konstitusi Indonesia.

Jenis-jenis KDRT

Indonesia mengadopsi jenis-jenis KDRT berdasarkan *CEDAW* yang tercatat dalam pasal 5 UU-PKDRT:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”

- a) **Kekerasan Fisik:** pasal 6, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan dapat berupa, tamparan, pemukulan, penjambakan, pendorongan secara kasar, penginjak-injakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, seterikaan, serta pembakaran
- b) **Kekerasan Psikis:** Pasal 7, mencakup makian dan penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut, larangan ke luar rumah atau bentuk-bentuk pembatasan kebebasan bergerak lainnya
- c) **Kekerasan Seksual:** Pasal 8, berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu

- d) **Kekerasan Ekonomi:** Pasal 9, berupa bentuk kekerasan yang dialami perempuan, khususnya yang berstatus sebagai istri atau ibu rumah tangga, adalah tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan wajar sehari-hari.

Identifikasi KDRT Berbasis *CEDAW*

Mengidentifikasi KDRT atau bentuk diskriminasi perempuan lainnya yang dituntut oleh *CEDAW*, dilakukan dengan menelusuri dua dokumen utama:

1. *CEDAW*, **Pasal 1** (menjelaskan pengertian diskriminasi yang kemudian diperjelas kembali dalam Butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender yang dapat menghambat perempuan untuk mendapatkan hak dan kebebasannya secara adil), **Pasal 2** (menekankan kewajiban negara dalam segi hukum terkait KDRT), **Pasal 5** (menegaskan kewajiban negara adalah untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk mengubah pola sosial, budaya dan prakteknya yang subordinat terhadap perempuan dan mengandung nilai stereotip terhadap peran tradisional perempuan dan laki-laki), dan **Pasal 16** (membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi).
2. **Rekomendasi Umum 19, nomor 1** (pengertian kekerasan berbasis

gender), **nomor 6** (pengertian diskriminasi terhadap perempuan), **nomor 7** (jenis kekerasan berbasis gender), **nomor 11** (peran stereotip terhadap perempuan), **nomor 23** (pengetian kekerasan dalam keluarga), dan **nomor 24** (rekomenadasi komite CEDAW b, c, f, i, k, o, q, r, s, t, u and v).

Peran Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional HAM

Keberadaan Komnas Perempuan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan didirikan sebagai sebuah *National Human Rights Institution* (NHRI) atau bisa juga disebut Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) khusus yang independen dengan mandat membangun kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia perempuan.²⁶ LNHAM merupakan mekanisme nasional yang didorong oleh PBB untuk memantau persoalan HAM di sebuah negara, memberikan koreksi, mendorong HAM dijunjung oleh suatu negara dan bangsa. Juga menjadi katalisator antara korban, komunitas, dan negara.²⁷ LNHAM merupakan sebuah lembaga Negara yang independen di luar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sebagai lembaga pemantau dan sistem koreksional. LNHAM diperlukan secara permanen, karena tidak mungkin negara

bisa memantau dirinya sendiri secara objektif. Dalam hal ini, bagaimana Negara dapat memberikan penilaian pada pelanggaran-pelanggaran atau pengabaian pemenuhan HAM yang dilakukan oleh personil/aparatnya baik secara individu maupun sebagai lembaga. Maka dibutuhkan pilar keempat, yakni LNHAM.²⁸

Urgensi atas independensi dan daya dukung operasional Komnas Perempuan telah dirumuskan dalam *Paris Principles 1993*, yang menjadi pedoman untuk menilai kinerja sebuah Komisi Nasional Penegakan HAM di seluruh dunia. Dalam dokumen ini dikenal setidaknya dua prinsip utama, yakni pluralisme dan independensi.²⁹ Kedua prinsip tersebut menjadi alat utama untuk melihat apakah Komisi Nasional Penegakan HAM akan bisa berfungsi secara efektif atau tidak. Pluralisme merupakan usaha untuk mencegah adanya kelompok tertentu yang bisa menimbulkan dominasi di dalam tubuh lembaga, sementara independensi ingin menegaskan bahwa Komisi Nasional Penegakan HAM bekerja semata-mata untuk penegakan HAM tanpa ada unsur politik didalamnya.³⁰ Dalam proses kerjanya, Komnas Perempuan mendasarkan kerangka kerjanya pada sejumlah instrumen HAM diantaranya adalah UU RI No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

²⁶ Saur Tumiur Situmorang, dkk., *Mengulas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai Lembaga HAM Nasional di Indonesia atau NHRI (National Human Rights Institution) dengan Mandat Spesifik* (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan, 2013)

²⁷ *Ibid*, 3.

²⁸ *Ibid*, 15.

²⁹ *Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles) Adopted by General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993.*

³⁰ *Melihat Kembali Prinsip-Prinsip Paris Untuk Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional HAM.* Diakses di <http://elsam.or.id/2015/08/melihat-kembali-prinsip-prinsip-paris-untuk-penguatan-kelembagaan-komisi-nasional-ham/>. Diakses pada 18 Maret 2019.

(CEDAW) dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Implementasi CEDAW dalam Mengatasi KDRT melalui Komnas Perempuan

Berikut adalah bentuk implementasi CEDAW dalam mengatasi KDRT melalui Komnas Perempuan:

1. Menerbitkan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan setiap tahunnya;
2. Meningkatkan mitra pengadalaan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Lembaga Advokasi dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT;
3. Memberikan Laporan Independen kepada Komite CEDAW terkait pelaksanaan CEDAW di Indonesia. Komite CEDAW dapat memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan CEDAW apabila diperlukan;
4. Memiliki peran yang besar dalam perumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Mendukung gerakan perempuan Indonesia dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Terkhusus penanganan kasus perempuan sebagai pekerja migran dengan menghasilkan MoU antara Indonesia dengan Malaysia terkait perlindungan pekerja perempuan sebagai pembantu rumah tangga pada tahun 2002;
6. Pembentukan Program Pengembangan Kurikulum HAM Berbasis Gender di pusat-pusat pendidikan, terkhusus penyelenggaraan *moot court* di Fakultas Hukum untuk mendorong pembangunan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan, khususnya kasus KDRT;
7. Membentuk penggalangan dan pengelolaan dana masyarakat untuk mendukung lembaga-lembaga Layanan di seluruh Indonesia. Komnas Perempuan bekerjasama dengan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dalam melakukan penggalangan dana publik serta pengelolaannya. Metode penyaluran dana dibagi menjadi dua jenis yaitu pemberian dana hibah untuk bantuan operasional organisasi pengadalaan dan dana bergulir yang ditujukan sebagai modal awal bagi organisasi atau individu untuk membangun kemandirian secara ekonomi.
8. Komnas Perempuan menerbitkan berbagai penelitian, jurnal dan buku yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan yang dapat diakses secara bebas di internet, sebagai media untuk meningkatkan kesadaran akan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.

KESIMPULAN

CEDAW adalah suatu bentuk konvensi internasional tentang perempuan dalam upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan merupakan dokumen internasional pertama yang mengakui Hak Asasi Perempuan (*International bill of rights of women*) yang bersifat mengikat negara peratifikasi. CEDAW terdiri dari Mukadimah dan 30 pasal. Mukadimah memuat dasar pikiran tentang penghapusan diskriminasi, Pasal 1 mendefinisikan istilah diskriminasi dan Pasal 2-4 berisi kewajiban umum yang diimban Negara Pihak. Pasal 5-16 merupakan ketentuan substantif, menjelaskan berbagai bidang yang secara khusus berpengaruh terhadap perempuan serta kewajiban negara yang berkaitan dengan bidang tersebut. Selanjutnya, pasal 17-30

menjelaskan secara rinci dasar dan fungsi Komite *CEDAW*, proses pengkajian dan prosedur pelaporan kepada Komite dan komunikasi dengan badan-badan PBB lainnya.

Indonesia meratifikasi *CEDAW* pada tahun 1984 yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Ratifikasi tersebut berakibat pada terikatnya Indonesia terhadap kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh *CEDAW* yaitu mengadopsi seluruh strategi Konvensi, melaksanakan Rekomendasi Komite, dan terlibat secara terus menerus terhadap berbagai perkembangan dan keputusan internasional yang berhubungan dengan perempuan. Namun, sejak peratifikasian *CEDAW* pelaksanaannya belum diimplementasikan secara utuh. Hal ini dibuktikan dengan mengakarnya budaya patriarki di Indonesia dan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang cenderung dianggap sebagai hal yang biasa. Artinya, kekerasan terhadap belum menjadi perhatian publik.

Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai landasan kerjanya dalam mengawasi dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Terkhusus kekerasan dalam rumah tangga yang selalu menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan tertinggi

dalam Catatan Tahunan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri, atau bersama-sama, terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang ter subordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi antara suami dengan isterinya saja, tetapi juga terjadi antara orang tua dengan anak atau antara majikan dengan pembantunya dan pihak-pihak yang ter subordinasi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga.

Dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, *CEDAW* memberikan pengaruh pada pembentukan hukum nasional di Indonesia, yaitu perumusan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT). Dalam pengaturan UU P-KDRT pasal 1, terdapat pengertian “kekerasan dalam rumah tangga”, yang dalam perumusannya juga telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 *CEDAW* tentang “diskriminasi”, beserta rekomendasinya (Butir ke-6 Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kekerasan terhadap Perempuan), dengan jelas menunjukkan hubungan satu dengan yang lain saling berkaitan dalam menjabarkan bentuk kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender adalah tindakan diskriminasi. Hal yang lebih memperkuat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk diskriminasi adalah sebagaimana dilandaskan pada ketentuan Pasal 28G

ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender juga telah dijamin perlindungannya dalam Konstitusi Indonesia.

Perumusan UU P-KDRT merupakan salah satu bentuk dari implementasi CEDAW melalui Komnas Perempuan. Komnas Perempuan mengembangkan metode kerja dan programnya dengan organisasi-organisasi perempuan dan sesama lembaga HAM berdasarkan prinsip kemitraan. Perannya adalah sebagai *correctional system* dan jembatan untuk mendorong sinergi yang optimal antara inisiatif dan kekuatan gerakan di tingkat masyarakat dan kinerja dengan aparat pemerintah penentu kebijakan. Tujuan akhirnya adalah memajukan perjuangan melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta pemenuhan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Referensi Tambahan

Jurnal

Harkrisnowo, Harkristuti. 2004.

“*Domestic Violence* (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis”. Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia.

Munti, Ratna Batara. 2005. “Lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT): Sebuah Bentuk Terobosan Hukum Dan Implikasinya Terhadap Hukum Nasional” Vol. 28. Jakarta: LBH APIK Jakarta.

Rosidin. “KDRT dalam Konstitusi dan Implementasi Hukum” (Jurnal Islam Indonesia Vol. 2).

Buku

Afifah, Neng Dara, dkk. 2014. “Rekam Juang Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan”. Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan.

Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. “CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan”. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis”. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel

Handayani, Yeni. 2016. “Perempuan dan Hak Asasi Manusia”. Media Pembina Hukum Nasional.

Huriyani, Yeni. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik”. Artikel Hukum Pidana dalam Media Publikasi Peraturan dan Perundang-undangan dan Informasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salim, Zafrullah. “Putusan Badan Peradilan Tentang Tidak Pidana KDRT”. Artikel Hukum Pidana dalam Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Website

Catatan Tahunan Komnas Perempuan. <https://www.komnasperempuan.go.id/publikasi-catatan-tahunan>

“*Overview of The Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*”. Diakses di <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

“*Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles) Adopted by General*